

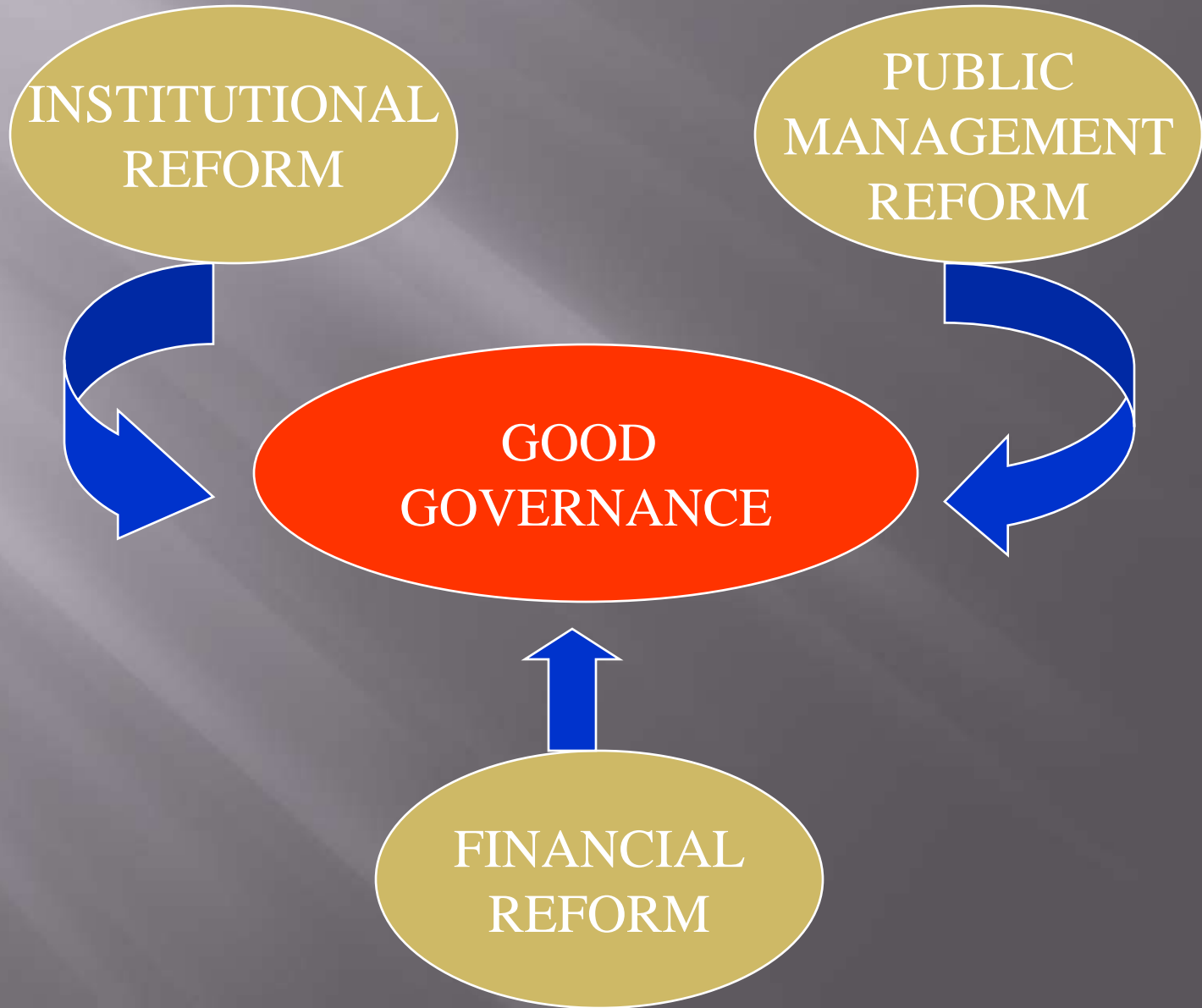
# **POLITIK HUKUM**

## **DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK**

Oleh:

PROF. Dr, Jamal Wiwoho, S.H.,MHum

# PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK



# KEBIJAKAN PUBLIK

- ▣ Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun untuk tidak dikerjakan
- ▣ Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah

# KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK

- ▣ Dibuat oleh Pemerintah
- ▣ Isinya berupa tindakan atau tidak bertindak
- ▣ Mempunyai tujuan tertentu

# Kebijakan Publik

- ▣ Diarahkan untuk menciptakan lingkungan sesuai dengan yang diharapkan
- ▣ Diarahkan agar mampu membangun daya saing masyarakat
- ▣ Perlu dihindarkan kebijakan publik yang mendorong timbulnya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah

# Kebijakan Publik Apa yang harus dibuat ???

	KEGIATAN STRATEGIS	KEGIATAN TIDAK STRATEGIS
MASYARAKAT MAMPU MELAKSANAKAN		
MASYARAKAT TIDAK MAMPU MELAKSANAKAN		

# RUANG LINGKUP

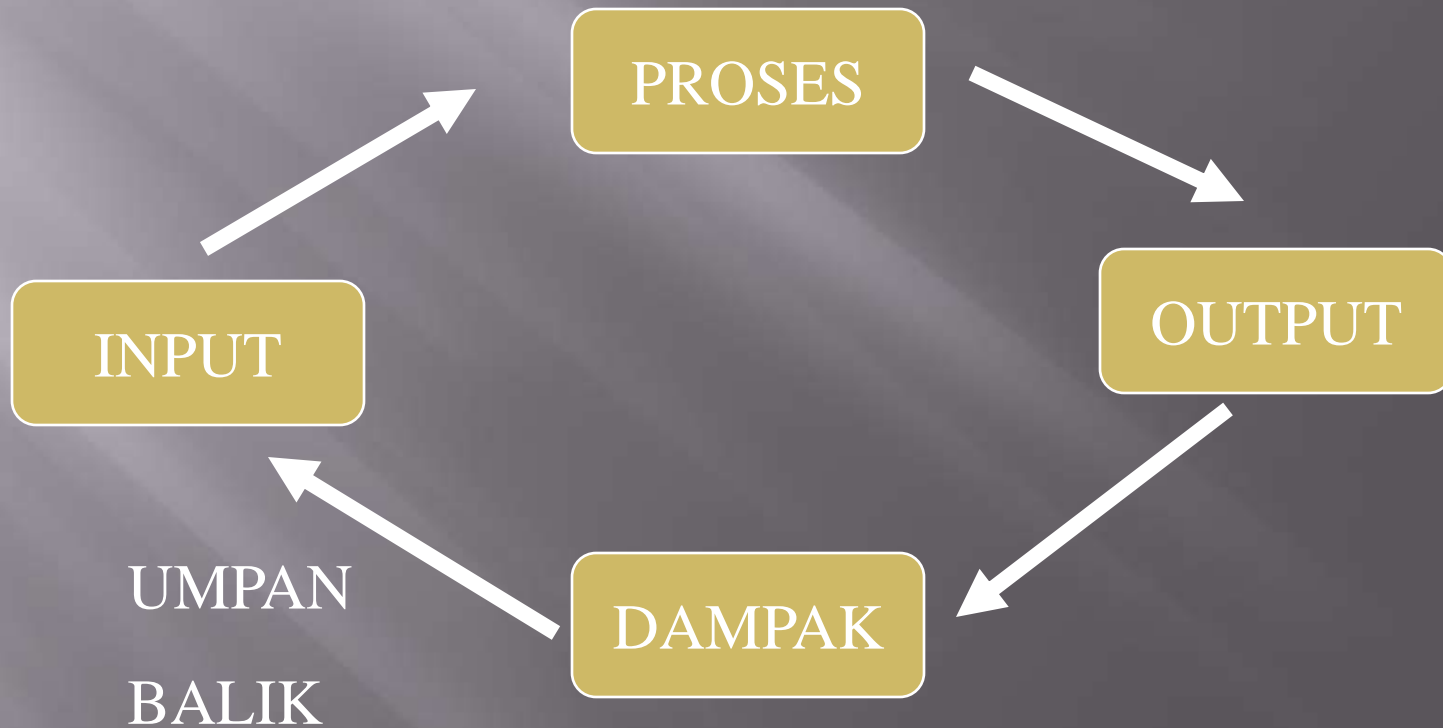
**MAKRO/  
DIRECTIVE POLICY**

1. TAP MPR
2. UU

**MIKRO/  
ADJUSTMENT POLICY**

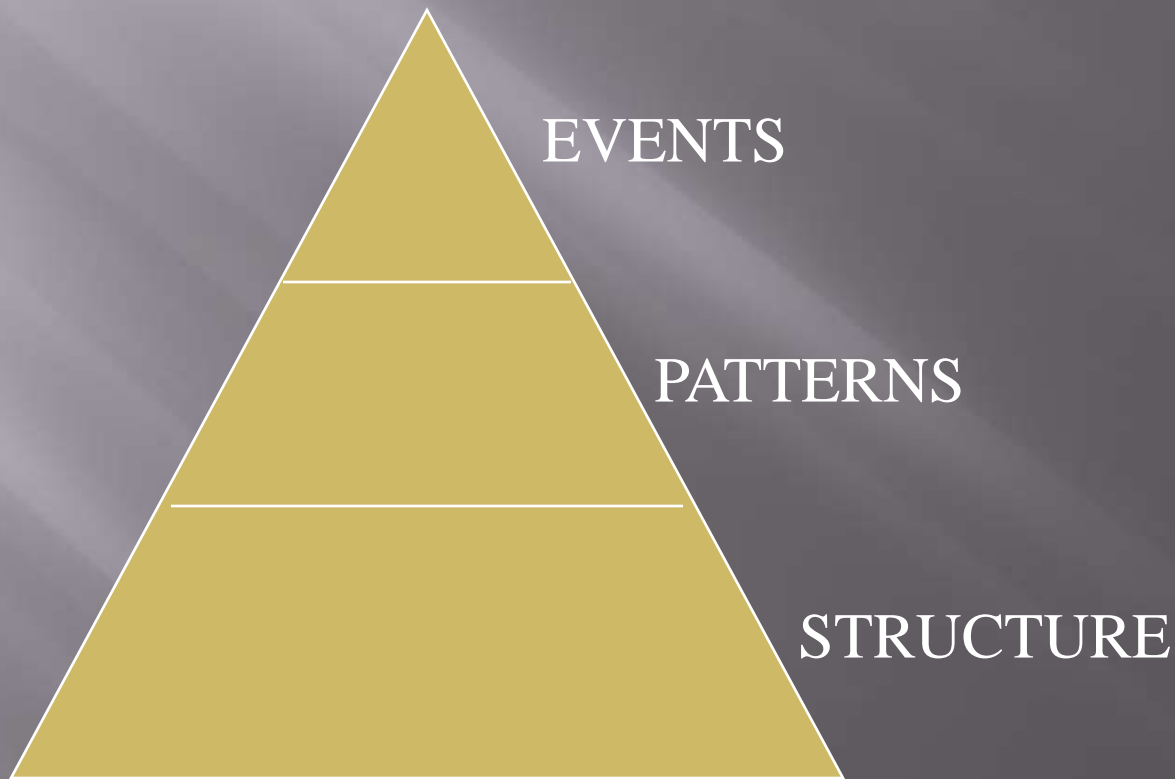
1. PP
2. PERPRES
3. PERMEN
4. PERDA

# ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

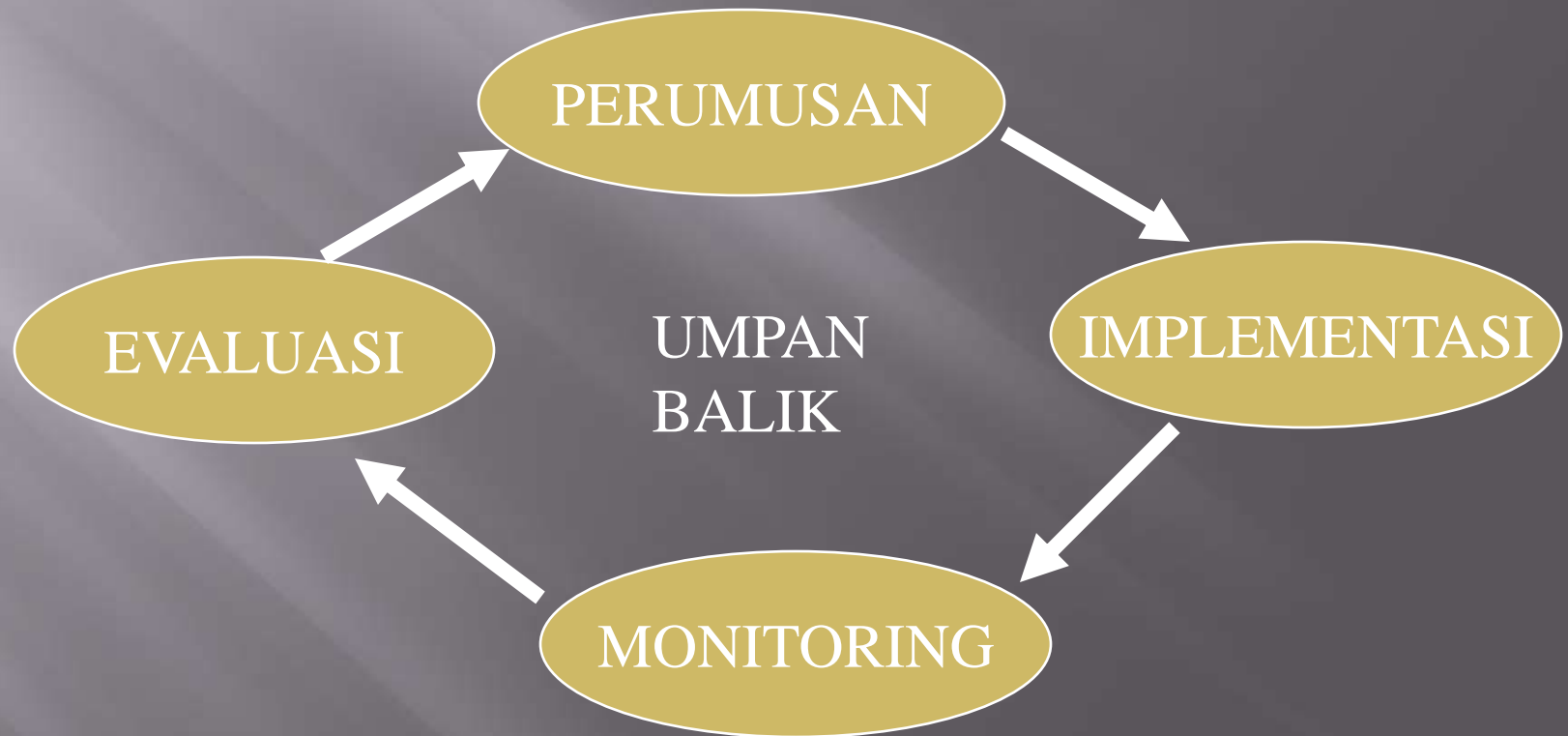




# Mengidentifikasi Masalah



# SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK



# 5 PERTIMBANGAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK

- ▣ WAKTU
- ▣ SDM
- ▣ BIAYA
- ▣ KELEMBAGAAN
- ▣ TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

# ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

- ▣ TAHAP PERUMUSAN
- ▣ TAHAP IMPLEMENTASI
- ▣ TAHAP EVALUASI

# EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

NO	MASALAH	EVALUASI
1	MAKRO	Penurunan investasi
2	RINCIAN	Masalah infrastruktur Masalah Perizinan Masalah keamanan Masalah Ketenagakerjaan Masalah Pajak
3	STRATEGIS/ INTI	Masalah Ketidakpastian Hukum Perizinan

# PERHATIKAN

- ▣ TIDAK ADA KEBIJAKAN PUBLIK YG KOMPLET/SEMPURNA
- ▣ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELALU MEMPUNYAI KEKURANGAN SEJAK DITETAPKAN

# PERHATIKAN !!!

- ▣ APAKAH KEBIJAKAN PUBLIK DIPUTUSKAN MELALUI PROSEDUR YANG BENAR DAN RASIONAL
- ▣ APAKAH KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIBUAT MENGAKOMODASIKAN TUNTUTAN DEMOKRASI

# EVALUASI KEBIJAKAN

- ▣ Menilai efektivitas kebijakan
- ▣ Menilai pencapaian tujuan
- ▣ Melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan



# EVALUASI KEBIJAKAN

- ▣ Melihat pada kinerja kebijakan
- ▣ Melihat manfaat dan hasil kebijakan
- ▣ Istilah lain yang sering dipakai:
  1. Penaksiran (*appraisal*)
  2. Pemberian angka (*rating*)
  3. Penilaian (*assesment*)

# FUNGSI EVALUASI KEBIJAKAN

1. FUNGSI EKSPLANASI
2. FUNGSI KEPATUHAN
3. FUNGSI AUDIT
4. FUNGSI AKUNTING

# 1. FUNGSI EKSPLANASI

- ▣ Menjelaskan realitas pelaksanaan kebijakan.
- ▣ Mengidentifikasi dan menjelaskan masalah, kondisi dan aktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan

## 2. FUNGSI KEPATUHAN

- ▣ Untuk mengetahui perilaku masyarakat, birokrasi dan aparat penegak hukum sesuai dengan kebijakan atau tidak

## 3. FUNGSI AUDIT

- ▣ Untuk mengetahui apakah output benar-benar sampai pada kelompok sasaran kebijakan atau justru terjadi penyimpangan kebijakan

## 4. FUNGSI AKUNTING

- ▣ Mengetahui dampak sosial ekonomi dari penerbitan kebijakan tersebut

# SYARAT EVALUASI KEBIJAKAN

- ▣ Tujuan: menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan
- ▣ Evaluator: profesional, menguasai kecakapan keilmuan, metodologi dan beretika. Evaluator harus mengambil jarak dengan pembuat, pelaksana dan sasaran kebijakan
- ▣ Evaluasi dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian

## 6 LANGKAH EVALUASI KEBIJAKAN

1. Identifikasi tujuan kebijakan yg dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan indikator/kriteria untuk mengukur dampak
6. Menentukan apakah perubahan tersebut akibat kebijakan tersebut atau krn kegiatan lain



# KRITERIA EVALUASI

KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai ?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yg diperlukan untuk mencapai hasil ?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil dapat menyelesaikan masalah ?
Keadilan	Apakah manfaat/hasil didistribusikan secara merata
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan masyarakat
Ketepatan	Apakah hasil yg diperoleh tepat sasaran

# MATRIK EVALUASI

JENIS KEBIJAKAN	SDM	DANA	LEMBAGA	SARANA	TRANS	RESPON	AKSES

# MENGAPAI TUJUAN KEBIJAKAN TIDAK TERCAPAI?

1. Keterbatasan sumber daya
2. Kesalahan pengadministrasian
3. Kebijakan dirumuskan terpaku pada satu faktor saja
4. Masyarakat memberikan respon dengan caranya sendiri
5. Adanya kebijakan yang saling bertentangan
6. Memecahkan masalah dengan biaya yang besar
7. Terjadi perubahan sifat masalah ketika kebijakan sdg dirumuskan atau dilaksanakan
8. Ada masalah baru yang lebih menarik

# TERIMA KASIH

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Univ Borobudur  
Kepala Biro Hukum Kemendagri  
HP: 081514357376